

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Komunikasi massa dengan beragam jenisnya senantiasa memengaruhi kehidupan manusia sehari-hari. Elemen terpenting dalam proses komunikasi massa adalah media massa. Media massa menjadi jawaban kebutuhan masyarakat sebagai alat komunikasi di dunia. Perkembangan perubahan zaman yang kian pesat membuat masyarakat tidak asing dengan kehadiran media massa dalam bentuk media online.

Romli (2018, h.34) mengemukakan “media online disebut juga *cybermedia* (media siber), internet media (media internet), dan *new media* (media baru) yang dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara *online* di situs web (*website*) internet.” Perkembangan industri media massa melalui media online dipelopori oleh Republika Online (*republika.co.id*) pada 17 Agustus 1995, Kompas Online (*kompas.co.id*) pada 14 September 1995, Tempo (*tempo.co*) pada 6 Maret 1996, Detik (*detik.com*) pada 9 Juli 1998 dan disusul perusahaan media online lainnya.

Data *Hootsuite (We Are Social)* pada Januari 2020 menunjukkan bahwa pengguna media online di Indonesia adalah sebanyak 175,4 juta jiwa. Hal ini setara dengan 64 persen dari jumlah penduduk di Indonesia, yakni sebanyak 272 juta jiwa (Kemp, 2020). Dapat disimpulkan bahwa sebanyak lebih dari setengah populasi Indonesia menggunakan media online dalam kehidupan sehari-hari.

Penyebaran informasi melalui media online membuat masyarakat mengetahui fenomena yang terjadi di dunia secara efektif dan efisien. Hal ini

memengaruhi minat masyarakat untuk mendapatkan berita yang mulai bergeser dari media cetak atau media elektronik ke media online. Data Perusahaan Informasi dan Pengukuran Global Nielsen Indonesia memaparkan pada 2017 pembaca media digital, yakni sebanyak 6 juta orang dibandingkan media cetak yang hanya 4,5 juta orang (Reily, 2017).

Akibatnya, semakin banyak perusahaan media massa yang memanfaatkan media online sebagai alat untuk menyebarluaskan berita, dibandingkan media cetak atau media elektronik. Fenomena ini seimbang dengan pemaparan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo yang menjelaskan total media massa di Indonesia diperkirakan mencapai 47.000, sebanyak 43.300 jenis media online, 200-300an jenis media cetak, dan sisanya adalah jenis media elektronik pada 2018 (Humaniora, 2019).

Proses produksi berita dilakukan melalui tahap *framing* dan *agenda setting*. Merujuk pada pandangan Robert N. Entman (dikutip dari Eriyanto, 2012, h.79) "*framing* adalah proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol ketimbang aspek lain." Sedangkan, *agenda setting* adalah "proses kolektif dimana, media, pemerintah, dan publik saling memengaruhi satu sama lain dalam menentukan isu-isu apa yang dianggap penting" (Severin dan Tankard, 2005, h.274).

Setelah berita tersebut diproduksi dan diakses oleh publik, maka pembentukan terhadap ideologi publik akan tercipta. Semakin kuat ideologi yang dibangun oleh media dalam menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, maka semakin kuat pula pengaruhnya terhadap pola pikir, perasaan, dan tindakan publik.

Junaidi (2013, h.21) memaparkan bahwa “perkembangan media bukan lagi hanya sebatas pada industri semata, namun lebih mengedepankan ideologi.”

Kendati demikian, pada hakikatnya dalam proses produksi berita, para pekerja media tetap memperhatikan isu yang memiliki *news value* atau nilai berita. Nilai berita merupakan prinsip jurnalis untuk menentukan kelayakan suatu peristiwa yang dianggap sebagai berita. Nilai berita dibagi menjadi “*immediacy, proximity, consequence, conflict, oddity, sex, emotion, prominence, suspence, dan progress*” (Kurnia, 2005, h.18-20).

Salah satu berita yang mengandung nilai berita dan diproduksi oleh media nasional hingga internasional adalah berita terkait pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau covid-19. Covid-19 adalah penyakit dari sekelompok virus yang menyerang tubuh manusia dan hewan. Penyakit menular ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di kota Wuhan Cina. Pada prosesnya, covid-19 menyerang saluran pernapasan tubuh manusia.

Pandemi covid-19 telah menjangkit tidak hanya di wilayah Tiongkok saja, namun Indonesia turut menjadi dampaknya. Pada 2 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus covid-19 pertama kali dialami oleh dua warga, berusia 31 dan 64 tahun di Indonesia. Kedua warga tersebut, terinfeksi oleh warga Jepang yang memasuki wilayah Indonesia (Detik.com, 2020).

Setelah kejadian tersebut, media di Indonesia menjadikan isu terkait covid-19 sebagai isu yang terutama dan mengesampingkan isu lain yang tidak relevan. Hal ini dilakukan secara terus menerus karena pandemi covid-19 menyangkut kesejahteraan dan keamanan warga secara global. Sehingga, pemberitaan terkait

pandemi covid-19 ditetapkan sebagai agenda media yang merupakan hasil dari agenda penentu kebijakan (pemerintah) dan agenda publik.

Pemberitaan di Indonesia terkait pandemi covid-19 yang banyak diproduksi oleh media dan diakses oleh publik, diantaranya adalah terkait perkembangan informasi terkait jumlah korban covid-19 dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dampak pandemi covid-19 terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, upaya dan kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19, hingga reaksi publik terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Langkah awal pemerintah dalam menangani covid-19 adalah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Tugas Satgas Penanganan Covid-19 tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Tempo.co, 2020).

Dampak pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia diantaranya adalah menurunnya angka perekonomian (krisis ekonomi), meningkatnya angka pengangguran akibat menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), hingga meningkatnya kasus kejahatan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan dalam menangani dampak pandemi covid-19.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah protokol kesehatan yang wajib ditaati oleh masyarakat, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada beberapa wilayah yang berpotensi penyebaran covid-19 terbesar, kebijakan *new normal*, serta kebijakan lainnya. Kendati demikian, setiap kebijakan tersebut

“tidak jarang menuai pro dan kontra” oleh publik yang berakibat pada sikap aktif, skeptis, dan apatis terhadap pemerintah.

Salah satunya dialami oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Isu terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan di tengah-tengah mewabahnya pandemi covid-19 di Indonesia. Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah dengan penularan covid-19 terbesar sejak awal kasus covid-19 terjadi di Indonesia. Disamping itu, wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah pusat atau sentral sebagai Ibu Kota Indonesia.

Satgas Penanganan Covid-19 memaparkan DKI Jakarta merupakan wilayah tertinggi penyebaran covid-19 di Indonesia. Per 30 Agustus 2020 sebanyak 1.094 terjadi penambahan kasus baru covid-19. Kasus ini berbeda dengan wilayah lainnya, seperti Jawa Timur sebanyak 466, Jawa Tengah sebanyak 138, Riau sebanyak 134, Jawa Barat sebanyak 103, Bali sebanyak 89, dan provinsi lainnya yang tidak mencapai 100 kasus baru (Defianti, 2020).

Beberapa dampak dari aspek ekonomi terkait pandemi covid-19 di wilayah DKI Jakarta dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, yakni perekonomian rendah pada angka 0,56 persen per 27 Juli 2020. Pada sektor perdagangan turun sebanyak -4,6 persen, sektor pendidikan -4,4 persen, sektor listrik dan gas -16,2 persen, industri olahan -3,2 persen bahkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) turun sebanyak 54 persen dari target 31,13 triliun (Antara, 2020).

Selain itu, sebanyak 50.891 pekerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan jumlah perusahaan yang melakukan PHK, yakni 6.782 menurut data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Energi Andri Yansah melalui pendataan Tahap I pada 2-4 April 2020 dan Tahap II pada 8-9 April 2020 (Iswinarno, 2020). Hal ini turut menyebabkan angka kemiskinan yang meningkat di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1,11 persen per Oktober 2020 dari yang semula sebanyak 3,42 persen pada September 2020, dan 4,53 persen pada Maret 2020 (Amalia, 2020).

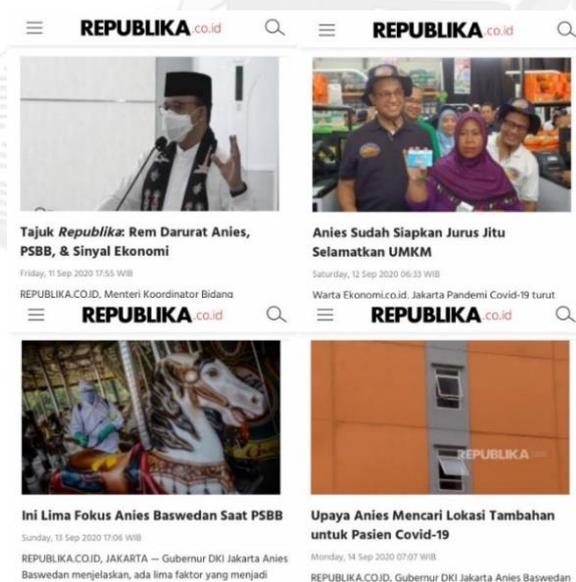
Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kebijakan dalam menangani pandemi covid-19 di DKI Jakarta. Salah satunya adalah kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Total Jilid II yang diumumkan pada 9 September 2020 dan diberlakukan pada 14 September 2020. Namun, kebijakan tersebut menuai “gelombang pro dan kontra” oleh warga DKI Jakarta, pengamat atau peneliti, serta dikalangan pemerintah.

Disamping itu, isu terkait Anies Baswedan ramai dibicarakan oleh publik terkait potensi Anies Baswedan menuju Pilpres (Pemilihan Presiden) Republik Indonesia pada 2024. Indo Barometer dalam penelitian survei pada Januari 2020 dan *Politika Research and Consulting* (PRC) mengamati bahwa Anies Baswedan menjadi salah satu sosok yang mungkin akan maju pada Pilpres 2024 (Pinterpolitik.com, 2020). Bahkan, isu ini turut diamati oleh *The Straits Times*, media massa berbasis Singapura (Hidayati, 2020).

Kondisi wilayah DKI Jakarta serta isu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dimanfaatkan oleh media online yang berlomba-lomba merekam sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani pandemi covid-19. Media online dengan ciri khas beragam merekonstruksikan peristiwa tersebut dengan *framing* yang diwujudkan dalam sebuah “berita”.

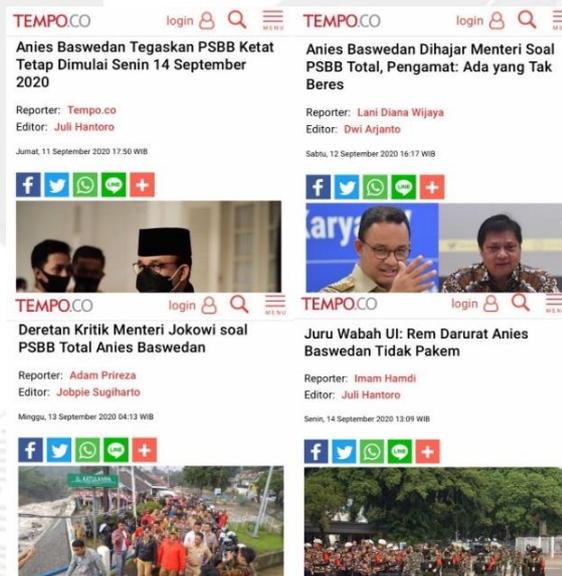
Akibatnya, pemberitaan-pemberitaan terkait Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut berpotensi untuk membangun atau menjatuhkan citra sosok Anies Baswedan di tengah-tengah publik. Apalagi, apabila media yang memberitakan isu terkait Anies Baswedan ‘memiliki kepentingan politik’ terhadap tingkat elektabilitas Anies Baswedan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis media online Republika.co.id dan Tempo.co sebagai bahan penelitian.

Republika.co.id merupakan salah satu media online di Indonesia berbasis sektarian sebagai media terpercaya oleh publik dibawah PT. [Republika Mandiri](http://Republika.com). Falsafah dasar Republika.co.id, yakni mengedepankan komunitas Muslim sebagai basis pengunjungannya serta memfokuskan misi untuk membangun umat Islam yang moderat, cerdas, dan berdaya (Republika.co.id, 2020). Jika merujuk pada laman Republika.co.id dalam fitur pencarian “Anies Baswedan” pada periode 11 – 14 September 2020 pembaca akan diperhadapkan sejumlah berita terkait Anies Baswedan sebagai berikut.



Gambar 1.1. Potret Berita Anies Baswedan di Republika.co.id
Sumber: Republika.co.id

Tempo.co merupakan media online nasional sebagai media yang menerapkan standar jurnalisme tinggi dibawah perusahaan Tempo Media Group (Tempo.co, 2020). Tempo.co dikenal dengan pemberitaannya yang seringkali mengkritik para penguasa serta pemerintah. Bahkan, sikap yang dilakukan oleh media Tempo.co beberapa kali membuat Tempo.co mengalami pembredelan. Hal ini dikarenakan, setiap berita tersebut banyak memotret sudut pandang lain terhadap sikap pemerintah. Jika merujuk pada laman Tempo.co dalam fitur pencarian “Anies Baswedan” pada periode 11 – 14 September 2020 pembaca akan diperhadapkan sejumlah berita terkait Anies Baswedan sebagai berikut.



Gambar 1.2. Potret Berita Anies Baswedan di Tempo.co
 Sumber: Tempo.co

Peneliti merasa topik ini menarik untuk diteliti, melihat bagaimana media online Republika.co.id dan Tempo.co sebagai media profesional dengan perbedaan falsafah maupun prinsip mendasar pada dua media online tersebut dalam membingkai berita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani pandemi covid-19 secara khusus terkait kebijakan PSBB Total Jilid II.

1.2. Identifikasi Masalah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan pengumuman kebijakan baru terkait penanganan covid-19 di wilayah DKI Jakarta pada 9 September 2020, yakni PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Total Jilid II yang diberlakukan pada 14 September 2020. Namun, setelah kebijakan diumumkan terjadi reaksi “gelombang pro dan kontra” oleh warga DKI Jakarta, pengamat atau peneliti, hingga pemerintah.

Sebagian warga yang pro ramai membicarakan kebijakan PSBB Total melalui cuitan di Twitter dan menilai bahwa kebijakan tersebut tepat karena angka penyebaran covid-19 di wilayah DKI Jakarta masih berstatus tinggi. Kebijakan tersebut turut didukung oleh ketua fraksi PKS Mohammad Arifin sekaligus DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) DKI Jakarta karena menilai bahwa ketersediaan dari segi kesehatan semakin menipis, maka perlu dilakukan ‘rem’ untuk menghentikan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta (Wijaya, 2020).

Sementara pada pihak kontra, sebagian warga menilai Anies Baswedan tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan. Karena sebelumnya Anies Baswedan sempat mengeluarkan kebijakan PSBB pada bulan April hingga Mei 2020 dan membuka kembali PSBB Total pada September 2020. Warga Jakarta berkomentar lebih baik dilakukan ‘*lockdown* sekalian’, dibandingkan PSBB yang tidak efektif dalam menekan angka penyebaran covid-19 (Firmansyah, 2020).

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Perkasa berkomentar bahwa kebijakan PSBB Total akan kembali menekan sektor usaha. Sementara itu, para peneliti turut mengomentari kebijakan tersebut, seperti peneliti

Ekonom Center of Reforms on Economic (CORE) Piter Abdullah memprediksi bahwa kebijakan PSBB Total dapat membuat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 dan peneliti *Institute for Development of Economics (Indef)* Bhima Yudhistira menilai bahwa gelombang PHK akan semakin membesar bahkan diperkirakan jumlah korban PHK mencapai 15 juta jiwa (Pratomo, 2020).

Kebijakan tersebut juga ramai dilakangan DPRD DKI Jakarta, oleh August Hamonangan yang mengkritik Anies Baswedan karena tidak melibatkan DPRD dan pemerintah pusat dalam kebijakan tersebut (Putri, 2020). Serta, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono yang mendesak Anies Baswedan untuk menghentikan kebijakan PSBB Total karena kebijakan tersebut berpengaruh besar terhadap masyarakat kecil (CNN Indonesia, 2020).

Beberapa Menteri kabinet Presiden Joko Widodo turut memberikan kirtik terhadap kebijakan Anies Baswedan, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menilai bahwa kebijakan PSBB Total Jilid II berpotensi pada penurunan IHSG dan Menteri Perindustrian Agus Guwimang menilai bahwa kebijakan tersebut dapat membawa dampak pada ambruknya kinerja manufaktur. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar berpendapat kebijakan jangan diterapkan pada sektor usaha yang menerapkan protokol kesehatan dengan tepat (Darisman, 2020).

Disamping itu, sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan isu fenomenal karena mempunyai modal politik unggul untuk maju pada Pilpres 2024. Fenomena ini menjadi pertimbangan peneliti untuk menganalisis berita pada media online Republika.co.id dan Tempo.co sebagai media profesional dalam

membangkai berita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan covid-19 terkait kebijakan PSBB Total Jilid II DKI Jakarta. Peneliti akan meneliti pemberitaan selama periode 9 September hingga 11 Oktober 2020.

Alur periode tersebut adalah saat pengumuman kebijakan PSBB Total Jilid II pada 9 September 2020, saat diberlakukannya kebijakan PSBB Total Jilid II pada 14 September 2020, dan berlangsungnya kebijakan tersebut selama empat pekan atau sampai 11 Oktober 2020. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode analisis *Framing* model Robert N. Entman. Analisis ini dilakukan guna melihat kinerja para jurnalis dalam membongkai berita yang disebarluaskan melalui media.

Analisis model Entman menilik *framing* pada dua dimensi, yakni seleksi isu dan penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Proses tersebut dilakukan dengan menganalisis berita melalui empat elemen, yakni “pendefinisian masalah (*define problems*), memperkirakan masalah atau sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgements*), dan menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*)” (Eriyanto, 2002, h.221-224).

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana media online Republika.co.id dan Tempo.co membongkai pemberitaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan covid-19 terkait kebijakan PSBB Total Jilid II?”

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media online Republika.co.id dan Tempo.co membongkai pemberitaan Gubernur DKI

Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan covid-19 terkait kebijakan PSBB Total Jilid II.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan studi Ilmu Komunikasi, yaitu memperluas wawasan khususnya tentang *framing* melalui media online. Kajian ilmu terkait *framing* pemberitaan terhadap tokoh masyarakat saat mewabahnya pandemi covid-19 belum banyak diteliti karena peristiwa covid-19 adalah peristiwa yang baru terjadi di Indonesia pada tahun 2020.

1.5.2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai fenomena *framing* melalui media massa yang dapat digunakan untuk memaknai setiap pesan dalam isi berita dengan pemikiran yang kritis dan cerdas.

1.6. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup garis besar latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini mencakup gambaran secara rinci mengenai subjek dan objek yang menjadi ruang lingkup penelitian.

3. BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup tinjauan pustaka berupa konsep dasar, landasan teori yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

4. BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan sebagai upaya dalam melakukan penelitian.

5. BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mencakup hasil dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

6. BAB VI PENUTUP

Bab ini mencakup jawaban simpulan dan saran yang konkrit terhadap hasil dan pembahasan penelitian.

